

THE PREPAREDNESS OF KPH DOLAGO TANGGUNUNG IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY POLICY IN BAKUBAKULU VILLAGE, SIGI REGENCY

Inggrid¹, Adam Malik Dan Golar²

inggridpossumah93@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the preparedness of KPH Dolago Tanggunung in the implementation of social forestry policy, and to know the preparedness of the community toward forest management through social forestry scheme. This research was conducted at Kilo Village, Sigi District, Central Sulawesi Province from September up to November 2016. Data were analyzed using qualitative approach, through scaling 1-3-5 (Modified Likert Scale). The parameters which were measured were the FMU's readiness in the implementation of the boundary structure, forest inventory covering: status, use and land cover, climate, human resources and demography, species of flora distribution, population type and fauna habitat, socioeconomic conditions, block division (biophysical characteristics field, potential of natural resources, the existence of rights or business permits and utilization), the division of the block includes: productivity and potential of the area, the design of the area for utilization while from the preparedness of the community was assessed based on understanding and community involvement itself. The result of the research showed that KPH Dolago Tanggunung was ver ready toward the implementation of Social Forestry policy that can be proved by the fulfillment of several criteria and indicators of KPH readiness. Meanwhile, the community was also well-prepared in the management of Community Forest based on the level of understanding and response to their involvement in the implementation of the program.

Keywords: social forestry, KPH preparedness, community preparedness

Perhutanan sosial diartikan berbeda-beda oleh berbagai pihak. Di beberapa negara perhutanan sosial (*social forestry*) dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Contohnya Selain itu masyarakat harus didukung oleh para stakeholders salah satunya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH harus mendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang di lakukan oleh masyarakat setempat. KPHP Model Dolago Tanggunung yang merupakan gabungan KPHP Unit IX dan KPHL Unit VI terletak di wilayah Kabupaten Sigi.

Perhutanan sosial dianggap bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen sosial. Dalam hal ini kata sosial

melibatkan semua pihak termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat sendiri (Awang, 2002).

Hal yang sama diutarakan oleh Yuniati (2012) bahwa Perhutanan Sosial diartikan juga sebagai sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti Repong Damar di Sumatera, Simpunk di Kalimantan, kane atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan sosial

memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal dan tujuan produksi yang lestari.

Di sisi lain menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perhutanan Sosial bahwa Perhutanan Sosial merupakan upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat, dalam kawasan hutan melalui Pengelolaan Hutan Desa atau izin usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, atau Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rangka berkontribusi terhadap berkurangnya ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan hutan, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan serta perlindungan dan pemulihan ekosistem menuju kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu kesiapan masyarakat merupakan pondasi yang sangat berpengaruh guna keberhasilan program tersebut.

Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.755/MENHUT-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas ± 144.349 Ha dengan rincian Hutan Lindung seluas ± 67.794 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 57.548 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 19.008 Ha.

Rencana pengelolaan KPHP Model Dolago Tanggunung ke depan diarahkan pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi: (a) Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (HHK-HA), (b) Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (HHK-HT), (c) Pemanfaatan kawasan; (d) Pemanfaatan jasa lingkungan (Jasling) dan (e) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan jasa lingkungan

(Jasling) dan (b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dilakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan perhutanan sosial diintegrasikan pada Rencana Pengelolaan Hutan di KPH Dolago Tanggunung dalam bentuk program Hutan Kemasyarakatan (Km), dengan tujuan untuk Mengetahui kesiapan KPH Dolago Tanggunung dalam penerapan kebijakan Perhutanan dan Mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial.

METODE

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ridwan (2006) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian ini juga merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Kasiran (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya dengan tidak di rubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi di Desa Bakubakulu selama 2 bulan mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan bulan 02 November 2016.

1.3 Populasi

Populasi dalam hal ini adalah Kelompok Tani yang terlampir pada SK Menteri yang berjumlah 55 orang.

1.4 Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum adalah kesiapan KPH serta kesiapan masyarakat dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial. Namun dalam variabel tersebut dijabarkan lebih jelas lagi melalui indikator dan kriteria penelitian ini. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan tertentu.

1.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas: indikator dan kriteria yang dimaksud seperti kesiapan KPH Dolago Tanggunung meliputi penetapan wilayah, kelembagaan, rencana, serta pemberdayaan masyarakat dan kesiapan masyarakat meliputi persepsi dan sikap serta kelembagaan kelompok tani tersebut.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pembagian kuesioner dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Selain menggunakan kuesioner, untuk meningkatkan keragaman data, maka informan yang dipilih dibatasi dengan kriteria: (a) Informan adalah kelompok tani, (b) Informan memiliki kawasan lahan yang terletak disekitar daerah program Perhutanan Sosial. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menggunakan jenis pemilihan secara sengaja atau *purposive sampling* pada pembagian kuesioner.

1.7 Analisis Data

Setelah semua data diolah, data kemudian disusun sedemikian rupa sehingga

memudahkan analisisnya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan data dianalisa melalui alur serta dilakukan bersamaan dengan jalannya penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kesiapan KPH

Kesiapan KPH dinilai sangat penting dan berpengaruh dalam penerapan blok pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan akses dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013).

3.2 Tata Batas Kawasan

Tata hutan pada KPH Dolago Tanggunung dilakukan berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi hutan. Tata hutan ini meliputi kegiatan pembagian blok dan pemetaan hasil pembagian blok tersebut berdasarkan karakteristik geofisik hutan, potensi sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Pada dasarnya pelaksanaan penataan hutan pada wilayah KPH bisa dikerjakan sendiri oleh organisasi KPH maupun difasilitasi oleh BPKH. Namun, pelaksanaan tata hutan pada KPH Dolago Tanggunung kali ini akan dilakukan

melalui fasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.

Kerangka kerja penyusunan tata hutan mengacu pada UU No 41 tahun 1999 Pasal 7 tentang pembentukan wilayah pengelolaan yang kemudian diatur dalam pasal 21.a tentang Tata hutan dan rencana pengelolaan. Pada program pemberdayaan masyarakat di desa Bakubakulu ini, KPH Dolago Tanggunung sudah melakukan tata batas kawasan hutan yang akan dikelola oleh masyarakat setempat. Areal kerja Hm seluas 590 Hektar dan sudah dilakukan tata batas keliling.

3.3 Inventarisasi Hutan

Iklim wilayah KPH Model Dolago Tanggunung dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis Peta Curah Hujan RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah KPH Dolago Tanggunung berkisar 1.000-2.400 mm/tahun. Curah hujan dominan berkisar 1.600-1.800 mm/tahun.

Sistem Lahan Secara fisiografis, wilayah KPHP Dolago Tanggunung terbagi atas satuan morfologi yaitu dataran lembah sungai, perbukitan dan pegunungan. Dari peta RTkRHL DAS BPDAS Palu Poso tahun 2009 diketahui bahwa di wilayah KPH ini terdapat tiga jenis morfologi hulu. Morfologi hulu mendominasi kawasan perbukitan dan pegunungan, diseluruh wilayah KPH, morfologi hilir terhampar tidak luas di wilayah lembah dan dataran. Adapun morfologi tengah dapat dijumpai menyebar pada lahan-lahan berlereng landai hingga agak curam.

Topografi dan lereng di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung didominasi pegunungan dan perbukitan. Adapun topografi dataran, berombak dan bergelombang hanya dijumpai pada wilayah-wilayah sempit diantara perbukitan dan pegunungan. Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama pada bagian tengah yang memanjang dari timur ke barat yang berbatasan dengan kawasan pertanian dan

pemukiman di kawasan APL baik di wilayah pesisir Kabupaten Parigi Moutong maupun di wilayah Lembah Palu dan sekitarnya. Sedangkan daerah dataran rendah dengan cakupan cukup luas ditemukan pada bagian timur wilayah KPH yaitu di wilayah Kecamatan Sausu hingga Kecamatan Balinggi. Kondisi topografi pada wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung bervariasi yang terdiri dari beberapa kelas lereng dengan sebaran sebagai berikut: 16,77% dari luas total kawasan berlereng datar (0-8%), 38,33% dari luas total kawasan berlereng landai (8-15%), 35,80% dari luas total kawasan berlereng agak curam (15-25%), 8,59% dari luas total kawasan berlereng curam (24-40%) dan sisanya sebanyak 0,50% dari luas total kawasan berlereng sangat curam (>40%).

Hidrologi dan DAS di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung empat DAS prioritas I yaitu DAS Palu, DAS Sausu, DAS Tindaki dan DAS Baliara. Sedangkan DAS lainnya termasuk dalam prioritas II adalah DAS Tavaili, DAS Toboli, DAS Taipa, DAS Poboya, DAS Korontua, DAS Pelawa, DAS Olaya, DAS Dolago, DAS Astina, DAS Tolai, DAS Torue, DAS Waytua. DAS prioritas III adalah DAS Bonu I, DAS Bonu II, DAS Pabengko dan DAS Maleali. Air sungai di wilayah KPH ini sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian. Hamparan lahan sawah yang luas terdapat di wilayah DAS Sausu, DAS Tolai, DAS Torue, DAS Astina, DAS Tindaki, DAS Korontua dan DAS Olaya di Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan di wilayah Kabupateng Sigi, sungai-sungai utama penyuplai air irigasi sawah adalah Sub DAS Sopi DAS Palu, DAS Wuno dan DAS Paneki. Sungai-sungai penyumbang banjir dan sedimentasi terbesar di wilayah KPH ini adalah Sungai Sausu, Sungai Torue, Sungai Tindaki, Sungai Dolago, Sungai Olaya, Sungai Baliara, Sungai Pelawa di Kabupaten Parigi Moutong dan Sungai Sopi di Kabupaten Sigi. Selanjutnya di wilayah Kota Palu sungai-sungai penyumbang banjir adalah Sungai Poboya, Sungai Wintu, dan Sungai Tavaili.

Tabel 1. Kondisi Penutupan Lahan/Vegetasi

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase %
1	Hutan Lahan Kering Primer	101.031,00	78,04
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	18.831,96	14,55
3	Pertanian Lahan Kering	538,79	0,42
4	Pertanian Lahan Kering Campur	5.959,02	4,60
5	Pertambangan	41,73	0,03
6	Sawah	2,48	0,00
7	Semak Belukar	3.062,06	2,37
8	Tubuh Air	0,16	0,00
Jumlah		129.467,20	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu, tahun 2013

Potensi tegakan Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, KPHP Model Dolago Tanggunung memiliki potensi tegakan rata-rata adalah 93,40 m³/Ha pada kelas hutan lahan kering primer, 62,82 m³/Ha pada kelas hutan lahan kering sekunder dan 7,59 m³/Ha pada kelas pertanian lahan kering. Dalam proses tata hutan ini diasumsikan bahwa ada tiga kelas potensi tegakan, yaitu terdiri atas tinggi (>150 m³) pada hutan lahan kering primer, sedang (50-150³) pada hutan lahan kering sekunder, dan rendah (<50 m³) pada kelas tutupan non-hutan.

Potensi Kayu/Non-Kayu KPHP Model Dolago Tanggunung merupakan wilayah KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang cukup tinggi. Di wilayah KPH ini terdapat hutan pegunungan/hutan dataran tinggi dan dataran rendah yang kaya jenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu, baik jenis komersial maupun non-komersial. Jenis-jenis

flora yang cukup dikenal masyarakat bernilai komersil tinggi di pasar Internasional maupun domestik, khususnya dari jenis kayu adalah Kayu Meranti (*Shorea spp*), Palapi (*Herriteria sp*), Nnyatoh (*Palaquums spp*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Bintangur (*Calophyllum soulatri*), Eboni (*Diospyros celebica*), Maraula (*Diospyros macrophylla*), Agatis/Damar (*Agathis spp*), Matoa (*Pometia pinnata*), Dao (*Dracontamelon dao*), Mangga hutan (*Mangifera foetida*), Binuang (*Octomeles sumatrana*), dll. Selanjutnya dari jenis for a berupa jenis non-kayu adalah Rotan (*Calamus spp*), Bambu (*Bambusa spp*), Aren (*Arenga pinnata*) dan jenis palma lainnya. Dari jenis flora tersebut beberapa jenis yang dikategorikan sebagai jenis yang dikategorikan sebagai jenis tanaman multiguna seperti Agatis (penghasil kayu dan getah damar), Durian (penghasil kayu dan buah), Aren (penghasil nira, ijuk, pati, lidi, buah) dan sebagainya.

Tabel 2. Jenis-jenis Hasil Hutan Non-Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung

No	Nama	Nama Ilmiah	Potensi	Ket
1	Sirih hutan	<i>Piper decumanum</i>		K
2	Rotan nook	<i>Daemonorop robusta</i>		BK
3	Telang	<i>Clitorea ternatea</i>		K
4	Tohiti	<i>Calamus inops</i>	Tinggi	K
5	Ronti	<i>Calamus minahassae</i> (A)	Tinggi	K
6	Paku siatea	<i>Cyathea amboinensis</i>		BK
7	Anggrek tanah	<i>Spathoglottis plicata</i>		BK
8	Sirih-sirih	<i>Hockeria peltata</i>		BK
9	Anggrek bulan	<i>Paraphalaenopsis</i> sp.		K
10	Pakis	<i>Parkia</i> sp.		BK
11	Aren	<i>Arenga pinnata</i> (Wurb.) Merr.		K
12	Pandan hutan	<i>Pandanus sarasinorum</i> Warb.		BK
13	Paku pohon	<i>Cyathea amboinensis</i> Blume		BK
14	Rotan batang	<i>Calamus zollingerii</i>	Sedang	K
15	Akar kuning	<i>Smilax leucophylla</i>		BK
16	Bambu jalar	<i>Dinorchloa barbata</i> (A)		BK
17	Kembang doa	<i>Asplenium</i> sp		BK
18	Gadung	<i>Dioscorea penthaphylla</i>		K
19	Kembang telang	<i>Clitorea ternatea</i>		BK
20	Paku liti	<i>Lygodium circinnatum</i> (Burn) SW		BK
21	Palem	<i>Palmae</i>		BK
22	Pinang hutan	<i>Areca</i> sp		BK
23	Bambu	<i>Bambusa</i> spp.		K

Keterangan:

K = Komersial

BK = Belum Komersial

Keberadaan Flora dan Fauna Langka di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung (Unit VI dan Unit IX) terdapat beberapa jenis flora dan fauna langka, tergolong endemic dan dilindungi. Jenis-jenis flora endemic langka dan dilindungi diantaranya jenis Kayu Ebony (*Diospyros celebica* Bakh), Anggrek bulan (*Paraphalaenopsis*) dan lain-lain.

3.4. Pembagian Blok

Berdasarkan hasil tata hutan melalui analisis SIG, maka wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung dikelompokkan ke dalam 2

(dua) blok besar, yaitu Blok Hutan Lindung dan Blok Hutan Produksi. Pada Blok Hutan Lindung terdiri dari Blok Inti dan Blok Pemanfaatan.

Sedangkan pada Blok Hutan Produksi terdiri dari Blok Pemanfaatan HHK HT, Blok Pemanfaatan HHK HA, Blok Pemanfaatan Kawasan, Blok Pemberdayaan Masyarakat, Blok Perlindungan, serta Blok Khusus. Deskripsi blok tiap fungsi dan kawasan hutan secara detil disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung

No	Nama Blok	Fungsi Hutan	Luas (ha)	Presentase (%)
1.	HL- Inti	(HL)	22.491	17
2.	HL- Pemanfaatan	(HL)	35.927	28
3.	HP- Perlindungan	(HPT)	1.320	1
4.	HP- Pemanfaatan HHK HA	(HPT/HP)	26.874	21
5.	HP- Pemanfaatan HHK HT	(HPT/HP)	22.276	17
6.	HP- Pemanfaatan Kawasan	(HPT)	8.313	6
7.	HP- Pemberdayaan Masyarakat	(HPT/HP)	7.187	6
8.	HP- Khusus	(HPT)	5.080	4
Jumlah			129.467	100

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung pada hutan lindung didominasi oleh Blok Pemanfaatan yaitu seluas 35.927 ha, sedangkan pada hutan produksi didominasi oleh Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 26.874 ha. Secara umum, komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Dolago Tanggunung telah mengakomodir beberapa kepentingan yaitu ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari. Secara ekonomi dan ekologi, serta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat

lokal, hal tersebut diharapkan dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Namun demikian jika dibandingkan dengan luas wilayah KPH, luas Blok Pemberdayaan Masyarakat masih relatif kecil untuk bisa dijadikan sebagai sarana dalam penyelesaian konflik lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih sedikitnya areal lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) dalam KPHP Model Dolago Tanggunung, yang mana hal tersebut menjadi salah satu kriteria dalam penentuan blok.

Tabel 4. Pembagian Blok Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Dolago Tanggunung

No	Nama Kawasan	Nama Blok	Jumlah Petak	Luas (Ha)
1.	KHL HL GN Tanggunung	HL Blok Inti	203	22.491
		HL Blok Pemanfaatan	331	35.927
2.	KH HP Dolago Sausu	HP Blok Pemanfaatan HHK HA	60	2.844
		HP Blok Pemanfaatan HHK HT	194	10.739
3.	KH HP Kalora	HP Blok Pemanfaatan HHK HA	20	1.255
4.	KH HP Sausu Trans	HP Blok Pemberdayaan Masyarakat	41	1.963
		HP Blok Perlindungan	3	123
5.	KH HPT Dolago Sausu	HP Blok Pemanfaatan HHK HA	333	17.227
		HP Blok Pemanfaatan HHK HT	132	7.416
		HP Blok Pemanfaatan Kawasan	51	3.024
		HP Blok Pemberdayaan Masyarakat	11	539
		HP Blok Perlindungan	23	1.055
6.	KH HPT GN. Tanggunung	HP Blok Pemanfaatan HHK HA	3	124
		HP Blok Pemanfaatan Kawasan	90	5.289
7.	KH HPT Palolo	HPT Blok Khusus	85	5.080
		HP Blok Pemanfaatan HHK HA	104	5.425
		HP Blok Pemanfaatan HHK HT	81	4.120
		HP Blok Pemberdayaan Masyarakat	73	3.899
		HP Blok Perlindungan	3	142
8.	KH HPT Sausu	HP Blok Pemberdayaan Masyarakat	16	786
Jumlah Sumber: Analisis Spasial			1.857	129.467

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah XVI Palu Tahun 2013

Sehubungan dengan adanya perkembangan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung, seperti hadirnya IUPHHK HTI PT. Coltan Agro, hingga awal tahun 2013 termasuk hasil survei potensi biogeofisik dan sosekbud tahun 2011-2013 maka penataan blok pengelolaan akan memperhatikan areal-areal kawasan yang telah ada pemanfaatnya. Karena itu, pada areal KPH

yang belum ada pemanfaatnya akan di blok kedalam pemanfaatan wilayah tertentu. Wilayah tertentu ini merupakan areal areal KPH yang dikelola langsung oleh pihak UPTD KPHP Dolago Tanggunung.

3.5. Pembagian Petak

Pembagian petak didasarkan pada produktivitas dan potensi areal, kawasan

lindung (gambut, resapan air, sempadan pantai, sungai dan danau, mata air, cagar budaya, rawan bencana, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa dan panati berbakau), selain itu didasarkan pada rancangan areal untuk pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pemberdayaan

masyarakat. Pembagian petak ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

Berikut ini tabel Penyelarasan antara Rancangan Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP dengan Arahana Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK

Tabel 5. Pembagian Blok Pada Wilayah KPHL dan KPHP

Arahana Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK	Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP	Keterangan
	<i>Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL</i>	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	- Blok Inti - Blok Pemanfaatan - Blok Khusus	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk Rehabilitasi	- Blok Inti - Blok Pemanfaatan - Blok Khusus	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
	<i>Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HP</i>	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	- Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Khusus	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk Rehabilitasi	- Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok Pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk pengusahaan	- Blok Perlindungan	Kawasan untuk pengusahaan

hutan skala besar	- Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HA - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok Pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus	hutan skala besar (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT, atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil	- Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok Pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus	Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.

Sumber: Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, 2012

3.6. Kesiapan Masyarakat

Dalam pembangunan HKM di desa ini, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan HKM adalah kesiapan masyarakat. Dalam mengelolah Hutan Kemasyarakatan dibutuhkan orang-orang yang siap kerja dan bertanggung jawab pada porsinya masing-masing. Menurut Rusli (2006) mengungkapkan bahwa kesiapan kerja diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan tanpa mengalami kesulitan, hambatan, dengan hasil maksimal dan target yang telah

ditentukan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai kesiapan kerja, mereka akan mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut sesuai harapan tanpa mengalami kesulitan dan hambatan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pada penelitian ini ada 55 responden yang mengisi kusioner serta wawancara mendalam. Berikut hasil dari penelitian kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu:

Dengan 3 (tiga) kategori jawaban:

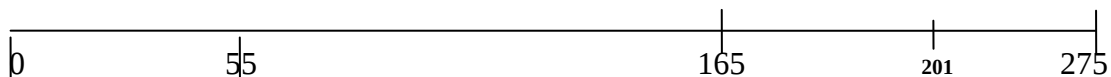
Tabel 6. Hasil rekapitulasi kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu

No	Kategori Kesiapan	Skor Jumlah Infroman	Nilai Skor Akhir (Skor x Jumlah Infroman)
1	Tidak Siap	1	$1 \times 9 = 9$
2	Kurang Siap	3	$3 \times 19 = 57$
3	Siap	5	$5 \times 27 = 135$
Jumlah: $9 + 57 + 135 = 201$			

Jumlah skor tertinggi = $5 \times 55 = 275$

Jumlah skor terendah = $1 \times 55 = 55$

Berdasarkan data yang diperoleh dari 55 responden, maka kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu terletak pada daerah siap. Secara kontinum dapat dilihat seperti ini:



Berdasarkan data yang diperoleh dari 55 responden, maka kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu, yaitu $201/275 \times 100\% = 73,09\%$ tergolong kuat.

Selain mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat dalam hal ini kelompok tani, penelitian ini juga mencari tau bagaimana persepsi atau pemahaman tentang pengertian Hutan Kemasyarakatan melalui wawancara mendalam dan hasilnya adalah sebagian masyarakat belum memahami apa itu Hutan Kemasyarakatan serta manfaat yang akan dirasakan oleh mereka sendiri nantinya.

Rendahnya pemahaman masyarakat ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah, masyarakat juga mengakui bahwa dalam rencana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di desa ini mulai dari SK Penetapan Areal Kerja HKM sampai pada tahun ini sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait hanya dua kali saja.

Program HKM baik pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi masih belum menjadi program prioritas sehingga anggaran untuk HKM kurang memadai/terbatas. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dalam implementasi HKM menjadi terhambat. Menurut Suhirman

dkk. (2012), pemerintah daerah mempunyai peran sentral dalam kebijakan HKM, tidak hanya untuk menerbitkan izin dan pemanfaatan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan fasilitasi bagi pengembangan HKM di wilayahnya mulai perencanaan, inisiasi, pendampingan, pengusulan sampai pembiayaan. Hal ini menunjukkan masih adanya persepsi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang menganggap bahwa sebagai program dari pemerintah pusat, pendanaan HKM juga seharusnya berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) baik secara langsung maupun melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan. Menurut Suhirman dkk. (2012), kondisi ini diperparah dengan status bidang kehutanan sebagai urusan pilihan, keterbatasan anggaran dan personil lapangan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat adalah tidak adanya pendampingan dari dinas terkait. Bagi masyarakat yang sangat tergantung dengan kawasan hutan, HKM memberikan keamanan dan kepastian dalam melakukan pengelolaan HKM sebagai sumber pendapatan. Bagi pemerintah daerah, HKM dianggap sebagai

salah satu model pemberdayaan masyarakat yang memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mendapatkan manfaat dengan tetap menjaga fungsi hutan. Sementara bagi pemerintah pusat, HKm selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk mempertahankan kawasan hutan terutama bagi kawasan yang sudah terlanjur digarap oleh masyarakat.

Oleh sebab itu Pengembangan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan lahan, dan pengembangan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait sesuai dengan perannya masing-masing agar implementasi HKm dapat berjalan sesuai dengan tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Kaskoyo, dkk (2014:128) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan implementasi HKm, pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan harus dibangun sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk mengelola hutan secara lestari. Pendampingan dari LSM, universitas, pemerintah, dan stakeholder lain juga diperlukan agar petani dapat mengimplementasikan HKm dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KPH Dolago Tanggunung tergolong siap dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial. Hal ini dibuktikan melalui kesiapan KPH dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang disyaratkan dalam penerapan skema-skema perhutanan sosial.

Masyarakat tergolong sangat siap dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dibuktikan melalui respon mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program HKm. Meskipun demikian, dari sisi tingkat pengetahuan mereka terhadap sejauhmana manfaat program HKm bagi mereka masih perlu ditingkatkan.

Saran

Rendahnya pengetahuan masyarakat atau kelompok tani tidak lepas dari pemerintah setempat. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah yang terlibat melakukan sosialisasi bahkan pendampingan yang rutin sehingga pengelolaan HKm ini bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amongraga, C. 2008. *Mengenal Program PHBM*, <http://www.infojawa.org>. Diakses 15 Januari 2018.
- Awang, S. A. 2002. *Social Forestry, belajar dari lapangan*. Warta FKMM Vol 5 No. 9 September 2002:124-136
- Bandura, A. 2001. *Social Cognitive Theory: An agentic perspective*. Annual Review of Psychology. 52 (1), PP. 1-26. Available at: <http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.physc.52.1.1>. Diakses 19 Februari 2018.
- Brady. 2009. *Pengertian Kesiapan Kerja*. <http://agusseptianheryanto.wordpress.com/2013/11/22/kesiapan-kerja>. Diakses 14 Februari 2014.
- Dwiprabeto, H., Mulyaningrum, Suwarno, E. 2013. Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* 10 (2) : 85 – 98.
- Elvida, 2009. *Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kkuala Kupak*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 6 No 1. April 2004:57-70.
- Hiadayat, 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Inggrid, 2015. *Kesiapan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara*. Tesis. Universitas Tadulako.

- Joko Sutisno. 2007. *Pengertian Kesiapan Kerja Secara Umum, Jawa*. [Diakses 10 Maret 2014].
- Kasiran, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: UIN Press.
- Kaskoyo, dkk. 2014. *Present State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia*. *Journal of Forest Science*. 30(1):15-29.
- Moleong, Lexi J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Penerbit. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nikadek,S, 2016. Kesiapan KPH Terhadap Renacana Pembangunan HKm di Desa Kilo Kabupaten Poso Pesisir Utara.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Ridwan, Engkos AK. (2006). *Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhirman, Alamsyah, Z., Zaini, A., Sulaiman, dan Nikoyan, A., 2012. Studi Perencanaan dan Penganggaran Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia: *Studi Kasus Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara*. Laporan Utama Sebagai Hasil Studi Lapangan. Kemitraan (Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia).
- S. Punaji, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Yuniati, S. 2002. CFM (Community Forestry Management) Policy Development: *Context and strategy. Experience from industry*